



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan PERKA LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Desa adalah Negeri/Negeri Administratif yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
9. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Negeri/Negeri



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Administratif, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Saniri/Badan Permusyawaratan Negeri Administratif, Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APBDDesa, swadaya masyarakat, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Negeri/Negeri Administratif meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Negeri/Negeri Administratif yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  14. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
  16. Masyarakat adalah masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat dan/atau masyarakat Negeri/Negeri Administratif sekitar lainnya.
  17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
  18. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
  19. Permintaan Penawaran adalah metode pengadaan dengan membeli/ membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
  20. Lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat.
  21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
  22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
  23. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberlakukannya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai dengan dana APBNegeri/Negeri Administratif.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

## BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip pengadaan sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Kedua Etika

#### Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.

**BAB IV  
RUANG LINGKUP PENGADAAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBNegeri/Negeri Administratif.
- (2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**Pasal 7**

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong-royong dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya dengan penjelasan tertulis dari Kepala Desa.

**Pasal 8**

Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

**BAB V  
PARA PIHAK**

**Bagian Kesatu  
Para Pihak Dalam Pengadaan**

**Pasal 9**

Para pihak dalam pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

**Bagian Kedua  
Kepala Desa  
Pasal 10**

Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKPDesa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Ketiga  
Kepala Seksi/Kepala Urusan  
Pasal 11

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola pengadaan:
  - a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
  - b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;
  - c. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
  - d. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
  - f. menerima hasil pengadaan;
  - g. melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
  - h. menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) TPK terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa diutamakan pelaksana kewilayahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam pengadaan adalah:
  - a. melaksanakan swakelola;
  - b. menyusun dokumen lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honorarium sesuai dengan standarisasi.

Bagian Kelima  
Masyarakat  
Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan.

Bagian Keenam  
Penyedia  
Pasal 14

Penyedia di desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli/terampil dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.



BAB VI  
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (2) Perencanaan pengadaan sesuai dengan RKPDesa meliputi:
  - a. jenis kegiatan;
  - b. lokasi;
  - c. volume;
  - d. biaya;
  - e. sasaran;
  - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
  - g. cara dan metode pengadaan (swakelola/penyedia);
  - h. pelaksana kegiatan anggaran;
  - i. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - j. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musrenbangdes pada saat penyusunan RKPDesa.
- (4) Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa dan rencana kerja kegiatan desa.

Pasal 16

- (1) Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKPDesa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa.
- (2) Pengumuman perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. nilai pengadaan;
  - c. jenis pengadaan;
  - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
  - e. nama TPK;
  - f. lokasi;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. cara dan metode pengadaan (swakelola/penyedia).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB VII  
PERSIAPAN PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Persiapan Pengadaan secara Swakelola  
Pasal 17

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
  - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. RAB pengadaan.
- (2) RAB pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola berupa:
  - a. gambar rencana kerja;
  - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. RAB pengadaan dan analisa harga satuan; dan
  - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola.

Bagian Kedua  
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia  
Pasal 18

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari:
  - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - c. kerangka acuan kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan) / daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
  - d. harga perkiraan sendiri (HPS); dan
  - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya, apabila



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
  - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut.
  - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah:
    - 1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
    - 2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dengan memperhitungkan:
  - a. harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. pajak pertambahan nilai (PPN); dan
  - c. biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan pengadaan.

BAB VIII  
PELAKSANAAN PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Pengadaan Melalui Swakelola  
Pasal 19

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - 1) TPK; atau
  - 2) TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
  - 1) TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
  - 2) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Narasumber dapat berasal dari masyarakat desa setempat, perangkat daerah, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
    - b. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat.
- 3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana / prasarana / peralatan / material/ bahan yang tercatat/dikuasai desa.
- 5) Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/ material/ bahan yang tidak dimiliki/dikuasai desa maka TPK melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- 6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

meliputi:

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. penggunaan narasumber / tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- 7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi swakelola.
  - 8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
  - 9) Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa.
  - 10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
  - 11) Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi:
    - a. nama kegiatan;
    - b. nilai pengadaan;
    - c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
    - d. nama TPK;
    - e. lokasi;
    - f. waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai); dan
    - g. cara dan metode pengadaan (swakelola).

Bagian Kedua  
Pengadaan Melalui Penyedia  
Pasal 20

- (1) Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:
  - a. pembelian langsung;
  - b. permintaan penawaran; dan
  - c. lelang.
- (2) Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan:
  - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
  - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
  - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen lelang.
- (4) Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain:
  - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk kerangka acuan kerja (KAK);
  - b. daftar kuantitas dan harga;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
  - f. persyaratan administrasi;
  - g. rancangan surat perjanjian; dan
  - h. nilai total HPS.
- (5) Persyaratan administrasi untuk penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
- (6) Khusus untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode lelang, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa izin usaha dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 1  
Pembelian Langsung  
Pasal 21

- (1) Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu penyedia;
  - b. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
  - c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama.

Paragraf 2  
Permintaan Penawaran  
Pasal 22

- (1) Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari paling sedikit 2 (dua) penyedia dilampiri persyaratan teknis berupa:
    - 1) kerangka acuan kerja (KAK);
    - 2) rincian barang/jasa;
    - 3) volume;
    - 4) spesifikasi teknis;
    - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
    - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
    - 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
  - b. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu) penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) penyedia tersebut;
  - c. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
  - d. TPK mengevaluasi penawaran penyedia;
  - e. Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
  - f. Dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
  - g. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - h. Dalam hal hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - i. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
  - j. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia; dan
  - k. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu) penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) penyedia tersebut.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3

Lelang

Pasal 23

- (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pengumuman lelang;
  - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;
  - c. pemasukan dokumen penawaran;
  - d. evaluasi penawaran;
  - e. negosiasi; dan
  - f. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
  - b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa.
  - c. Pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
    - 1) nama paket pekerjaan;
    - 2) nama TPK;
    - 3) lokasi pekerjaan;
    - 4) ruang lingkup pekerjaan;
    - 5) nilai total HPS;
    - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
    - 7) jadwal proses lelang.
  - d. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti lelang; dan
  - b. TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
  - a. apabila terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; atau
  - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi.
- (8) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Pasal 24

Dokumen Pengadaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengacu format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Pengendalian  
Pasal 25

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga  
Bukti Transaksi  
Pasal 26

- (1) Bukti transaksi pengadaan terdiri atas:
  - a. bukti pembelian; dan
  - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat  
Perubahan Surat Perjanjian  
Pasal 27

- (1) Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi keadaan kahar; atau
  - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. volume; dan/atau
  - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.
- (5) Perubahan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan Kepala Desa.

Bagian Kelima  
Pengumuman Hasil Pengadaan  
Pasal 28

- (1) TPK mengumumkan hasil pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui penyedia dengan metode permintaan penawaran dan lelang meliputi:
  - a. nama Kegiatan;
  - b. nama Penyedia;
  - c. nilai Pengadaan;
  - d. keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
  - e. lokasi; dan
  - f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

**BAB IX  
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA**

**Pasal 29**

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
  - a. kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
  - b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/ Kaur menerima hasil kegiatan pengadaan:
  - a. melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima (BAST); atau
  - b. melalui penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

**Pasal 30**

Hasil pengadaan barang/jasa berupa belanja modal dicatat sebagai aset desa.

**BAB X  
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA**

**Pasal 31**

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

**BAB XI  
KEADAAN KAHAR**

**Pasal 32**

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa di desa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial; dan/atau
  - c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian.

## BAB XII PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

### Pasal 33

Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat perjanjian apabila:

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender;
- b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur; dan
- c. penyedia barang/jasa terbukti melakukan korupsi kolusi nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

## BAB XIII SANKSI

### Pasal 34

- (1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;
  - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
  - e. tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:
  - a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
  - b. gugatan secara perdata; dan/atau
  - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila Kasi/Kaur/TPK melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

proses pengadaan barang/jasa, maka dikenakan:

- a. sanksi administrasi;
  - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
  - c. sanksi pidana.
- (6) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses pengadaan barang/jasa di desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

##### Pasal 36

- (1) Pembinaan pengadaan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Daerah.
- (3) Apabila diperlukan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

##### Pasal 37

Pengawasan pengelolaan pengadaan dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasional pelaksanaannya dilakukan oleh APIP Daerah.

##### Pasal 38

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

#### BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 39

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

pengadaan tanah untuk keperluan Desa

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Rancangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 14 Februari 2023  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 14 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

A. DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA (PERMINTAAN PENAWARAN)

NO	CONTOH FORMAT	JENIS FORMAT
1	Surat Permintaan Penawaran	Form_PBJD.D
2	Surat Penawaran Harga	Form_PBJD.E
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Form_PBJD.F
4	Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa	Form_PBJD.G
5	Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.H
6	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.I
7	Surat Persetujuan Penawaran	Form_PBJD.J
8	Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Pemenang	Form_PBJD.K

B. DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA (LELANG)

NO	CONTOH FORMAT	JENIS FORMAT
1	Pengumuman pengadaan	Form_PBJD.A
2	Survey Harga	Form_PBJD.B
3	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Form_PBJD.C
4	Surat Permintaan Penawaran	Form_PBJD.D
5	Surat Penawaran Harga	Form_PBJD.E
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Form_PBJD.F
7	Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa	Form_PBJD.G
8	Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.H
9	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJD.I
10	Surat Persetujuan Penawaran	Form_PBJD.J
11	Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Pemenang	Form_PBJD.K
12	Pengumuman Hasil	Form_PBJD.L
13	Undangan Penjelasan Umum	Form_PBJD.M
14	Berita Acara Penjelasan Umum	Form_PBJD.N
15	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan	Form_PBJD.O
16	Surat Perjanjian Kerjasama	Form_PBJD.P
17	Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.Q
18	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.R
19	Berita Acara Pembayaran	Form_PBJD.S
20	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.T
21	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Form_PBJD.U
22	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Form_PBJD.V
23	Surat Pernyataan Kebenaran Usaha	Form_PBJD.W



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

1. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PENGADAAN

PENGUMUMAN

Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Negeri/Negeri Administratif ....., kami akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket Pekerjaan : .....
- b. Tahun anggaran : .....
- c. Nama TPK : .....
- d. Lokasi : Dusun ..... Desa .....
- e. Ruang Lingkup Pekerjaan : .....
- f. Nilai Total HPS : Rp. ....,- (terbilang)
- g. Waktu Pelaksanaan : ..... hari kalender

JADWAL PROSES LELANG

No.	Uraian	Tanggal	Pukul	Tempat
1	Persiapan			Balai desa
2	aanwijzing/ Penjelasan			Balai desa
3	Penerimaan dokumen			Balai desa
4	Pembukaan dokumen			Balai desa
5	Evaluasi penawaran dan Kelengkapan			Balai desa
6	Penetapan Pemenang			Balai desa
7	Surat Perjanjian/Surat Perintah			Balai desa

.....,

.....20....

MENGETAHUI KEPALA  
NEGERI/NEGERI ADM. ....

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEGERI/NEGERI ADM.

.....  
KETUA

.....

.....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

2. CONTOH FORMAT SURVEY HARGA

FORM SURVEY HARGA NEGERI/NEGERI ADM :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
Harga sudah termasuk pajak tang berlaku				

....., tanggal .....  
 YANG MELAKSANAKAN SURVEY KAUR/KASI ..... SELAKU PELAKSANA  
 KEGIATAN ANGGARAN

.....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

3. CONTOH FORMAT HPS

Desa :  
 Kecamatan:  
 Kabupaten:  
 Provinsi :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
<b>1. BAHAN</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
dst.					
Sub Total 1)				-	-
<b>2. ALAT</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst.					
Sub Total 2)				-	-
<b>3. UPAH</b>					
1					
2					
3					
4					
dst.					
Sub Total 3)				-	-
Jumlah Biaya Konstruksi (1+2+3)					
<b>4. BIAYA OPERASIONAL</b>					
1					
2					
3					
4					
dst.					
Biaya Operasional				-	-
Total Biaya				-	-

....., ..... 20..... KAUR/KASI ..... SELAKU PELAKSANA  
 KEGIATAN ANGGARAN



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

.....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 NEGERI/NEGERI ADM ..... KECAMATAN  
 .....KABUPATEN.....  
 Jalan ..... Nomor ..... Telepon .....  
 .....\*)

Nomor : .....\*)  
 Sifat :Penting Kepada  
 Lampiran : --- Yth.Direktur/Pimpinan/Pemilik  
 Perihal : Permintaan Penawaran di

Pengadaan Barang/Jasa .....  
 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan .....,  
 yang didalamnya terdapat pekerjaan .....  
 Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah:  
 a. Ruang lingkup pekerjaan .....  
 b. Daftar barang/jasa :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan Surat Penawaran. Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Negeri Adm. .... Kecamatan..... Kabupaten ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal .....
2. Surat Penawaran dilampiri :
  - a. kerangka acuan kerja (KAK);
  - b. rincian barang/jasa;
  - c. volume;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - f. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
  - g. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Demikian Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN MENGETAHUI  
 .....  
 KAUR/KASI .....SELAKU  
 PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

NEG./NEG ADM  
 .....  
 KETUA



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm

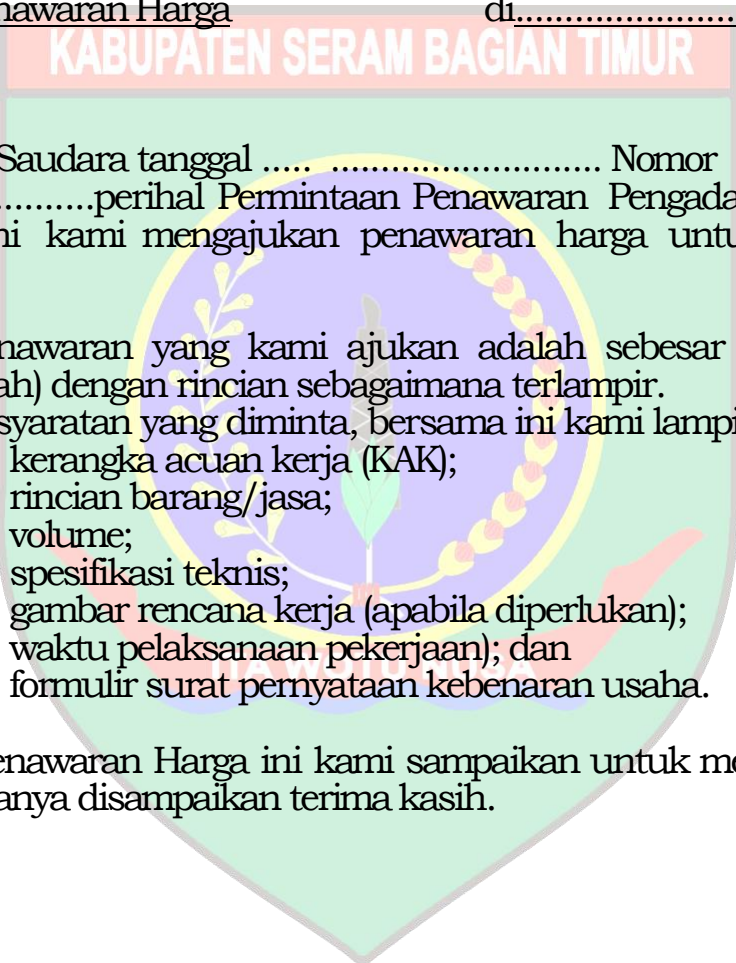


PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

5. CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

.....\*), ..... Nomor :  
: Kepada  
Sifat : Penting Yth. Ketua Tim Pelaksana kegiatan  
Lampiran : 1 (satu) berkas Negeri/Neg.  
Adm.....  
Perihal : Penawaran Harga di.....



Menanggapi surat Saudara tanggal ..... Nomor :  
.....perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa,  
maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan  
pekerjaan  
tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp..... (

..... Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.  
Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan :

1. kerangka acuan kerja (KAK);
2. rincian barang/jasa;
3. volume;
4. spesifikasi teknis;
5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
6. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa,  
dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
.....

.....

\*) : Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



6. Contoh Bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK)

[Kop Surat]

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan
- D. Lingkup Kegiatan
- E. Lokasi Kegiatan
- F. Sumber Pendanaan
- G. Pelaksana Kegiatan
- H. Jangka Waktu Pelaksanaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

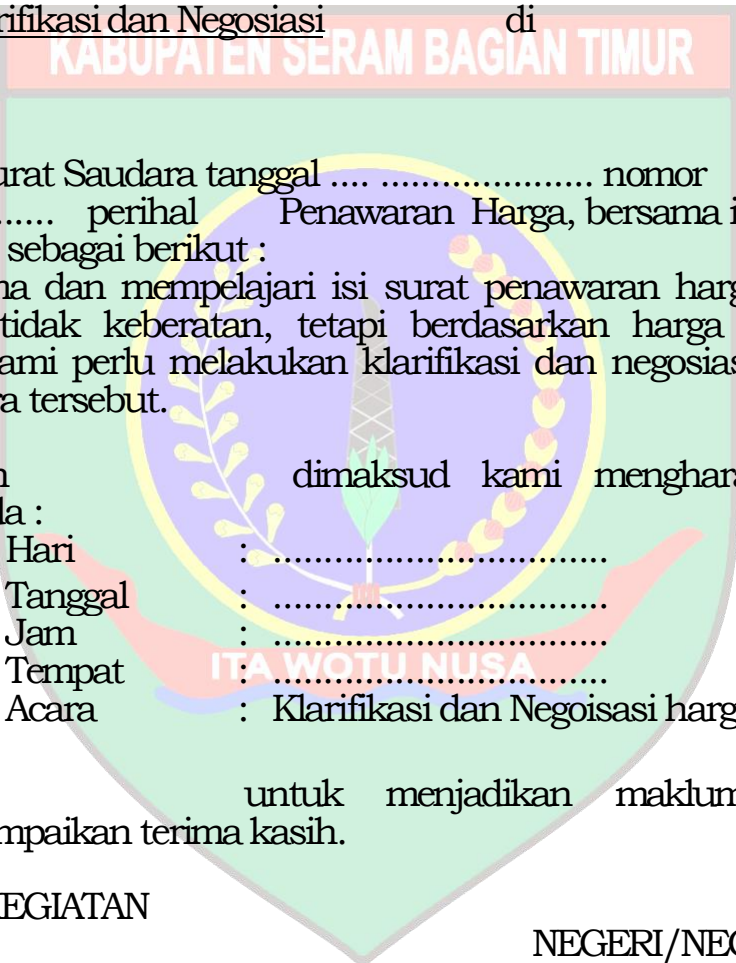


8. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEGERI/NEG. ADM ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN

Jalan ..... Nomor ..... Telepon .....  
.....\*)

Nomor : ..... Kepada .....\*)  
Sifat : Penting Yth.Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Lampiran : ---  
Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi di



Menindaklanjuti surat Saudara tanggal .... nomor :  
..... perihal Penawaran Harga, bersama ini kami  
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut.

2. Untuk keperluan ..... dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Acara : Klarifikasi dan Negoisasi harga

Demikian ..... untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
MENGETAHUI

NEGERI/NEG. ADM

.....  
KAUR/KASI .....SELAKU  
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

KETUA

.....

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

9. Contoh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : .....

Pekerjaan : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... pada Pukul ..... WIB dengan mengambil tempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

.....  
 Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Negeri Adm ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari .....

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa yang dihadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan .....
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari ..... menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari ..... adalah sebesar Rp. .... (..... Rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai.
- b. Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran surat penawaran harga.
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari ..... sebesar Rp ..... (.....Rupiah) menjadi sebesar Rp. .... (.....Rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia Barang/Jasa dari ..... dan selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dari ..... akan membuat dan menyampaikan Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
Jumlah					
					(..... Rupiah)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....\*) , .....

.....  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK NEGERI/NEG.  
 ADM ..... KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
 ..... KETUA



.....

MENGETAHUI KAUR/KASI.....SELAKU PELAKSANA  
 KEGIATAN ANGGARAN

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm.



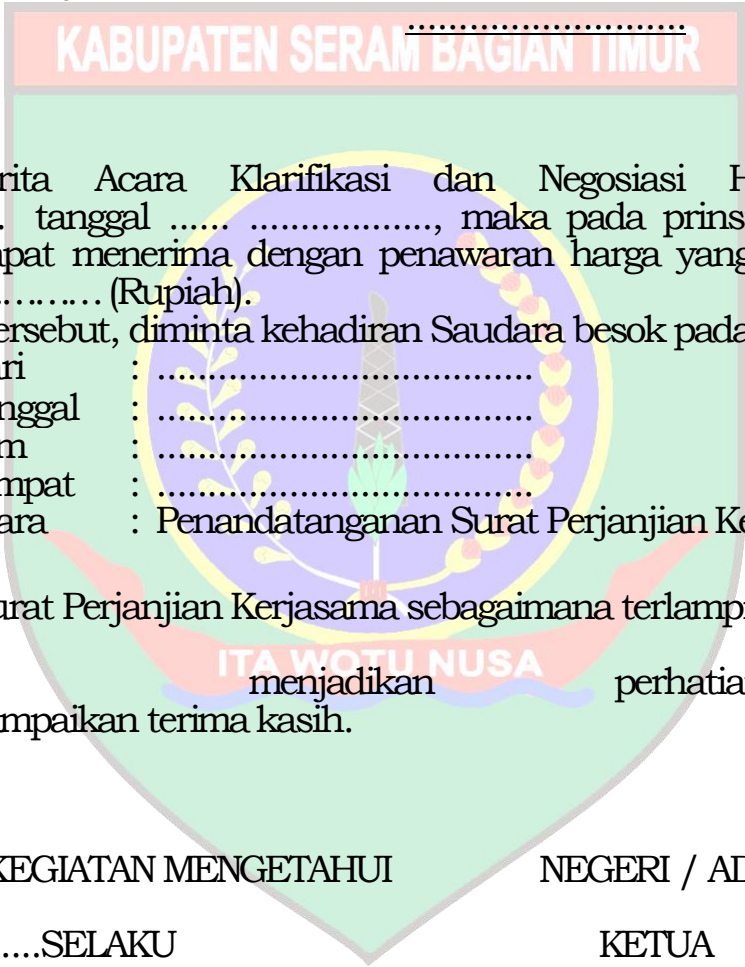
PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



10. Contoh Surat Persetujuan Penawaran

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 NEGERI/NEGERI ADM ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN.....  
 Jalan ..... Nomor ..... Telepon .....  
 .....\*)

Nomor : .....\*) , .....  
 Kepada  
 Sifat : Penting Yth.Direktur/Pimpinan/Pemilik  
 Lampiran : 1 (satu) bendel .....  
 Perihal : Persetujuan Penawaran di



Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor :  
 ..... tanggal ..... , maka pada prinsipnya kami tidak  
 keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati  
 sebesar Rp. .... (Rupiah).

Sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Tempat : .....  
 Acara : Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama

Adapun konsep Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana terlampir.

Demikian untuk ..... menjadikan ..... perhatian dan atas  
 kehadirannya disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN MENGETAHUI NEGERI / ADM  
 .....  
 KAUR/KASI.....SELAKU KETUA  
 PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

.....

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm.

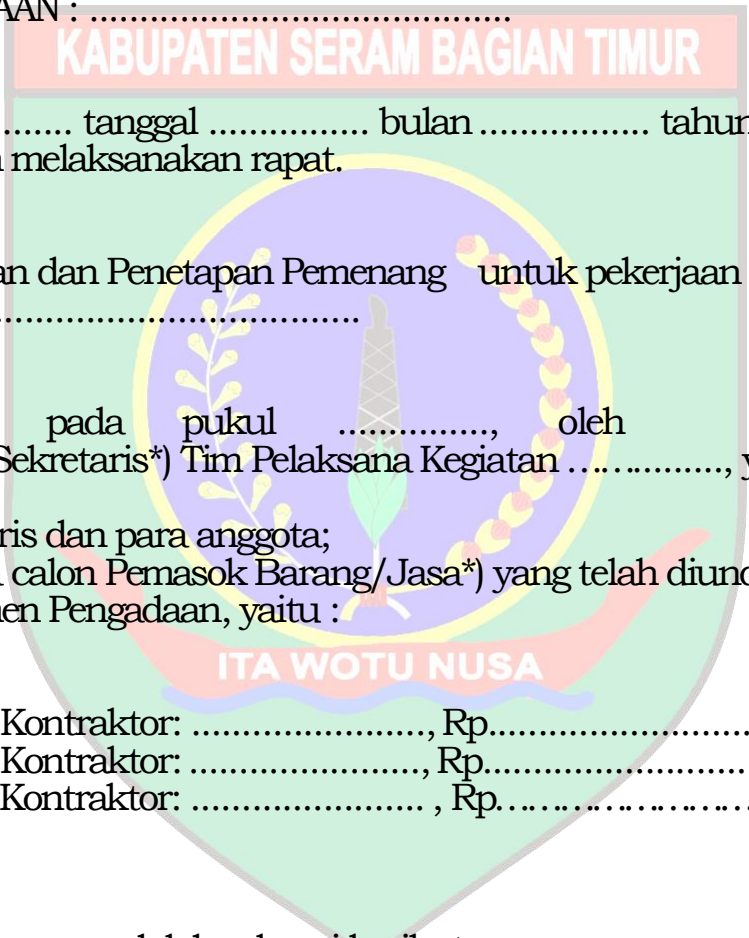


PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

11. Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Pemenang

BERITA ACARA  
PEMBUKAAN PENAWARAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN PEMENANG  
 Nomor : .....

TENTANG :  
 PEKERJAAN : .....



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun, bertempat di ....., telah melaksanakan rapat.

Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang untuk pekerjaan .....

Rapat dibuka pada pukul ....., oleh Ketua/Sekretaris\*) Tim Pelaksana Kegiatan ....., yang dihadiri oleh :

- Ketua, Sekretaris dan para anggota;
- Para peserta calon Pemasok Barang/Jasa\*) yang telah diundang dan mengambil dokumen Pengadaan, yaitu :

- a. Toko/Pemasok/Kontraktor: ....., Rp.....
- b. Toko/Pemasok/Kontraktor: ....., Rp.....
- c. Toko/Pemasok/Kontraktor: ....., Rp....., dst

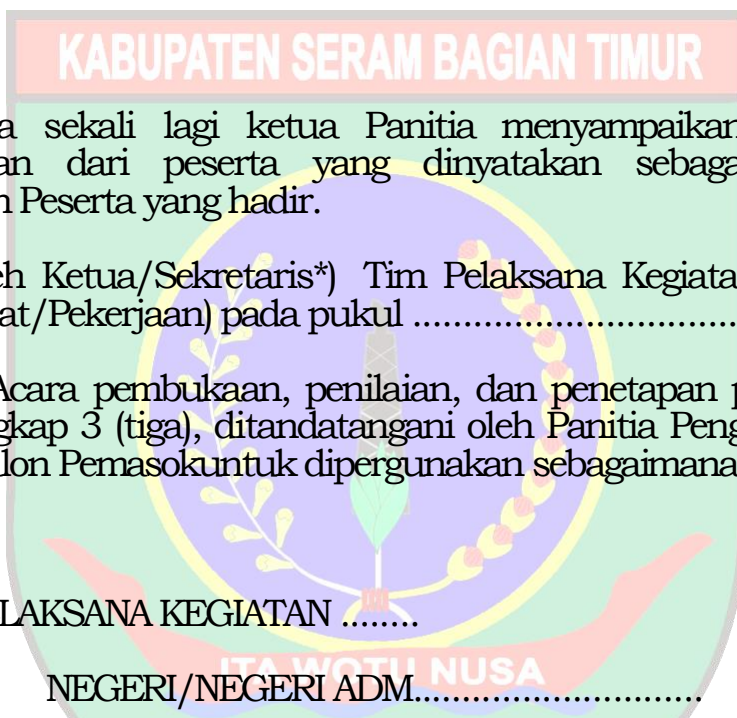
Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No	Agenda Kegiatan	Hasil Kesepakatan
1	Penerimaan Penawaran	Peserta Yang Memasukan Penawaran sebanyak .....
2	Pembukaan Penawaran	Pembukaan Penawaran dilaksanakan mulai pukul ..... s/d..... Jumlah Penawaran yang dibuka sebanyak .....
3	Penilaian/Evaluasi Penawaran (Ranking Penawar)	Berdasarkan kriteria penilaian Penawaran, maka diperoleh rangking hasil penilaian Penawaran sebagaimana terlampir.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4	Penetapan Pemenang	Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian penawaran yang masuk maka ditetapkan
		<p>Pemenang Pengadaan ini adalah Toko/ Pemasok/ Kontraktor : ..... dengan harga penawaran sebesar Rp.....</p> <p>Selanjutnya Pemenang segera melakukan perjanjian kerja dengan pihak TPK.</p>



Pada akhir acara sekali lagi ketua Panitia menyampaikan nama dan jumlah penawaran dari peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang dihadapan seluruh Peserta yang hadir.

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris\*) Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang (Bahan/Alat/Pekerjaan) pada pukul .....

Demikian Berita Acara pembukaan, penilaian, dan penetapan pemenang ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari calon Pemasok untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN .....  
 NEGERI/NEGERI ADM.....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.	.....	KETUA	1.....
2.	.....	SEKRETARIS	2.....
3.	.....	ANGGOTA	3.....

WAKIL DARI CALON PEMASOK/KONTRAKTOR

1. Toko/Pemasok/Kontraktor : .....
2. Toko/Pemasok/Kontraktor : .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda Tangan : .....

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda Tangan : .....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

12. Contoh Pengumuman Hasil Pengadaan

PENGUMUMAN

Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Negeri/Negeri Adm ....., Kami telah melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Paket Pekerjaan : .....
- b. Lokasi : Dusun ..... Negeri/Negeri Adm .....
- c. Ruang Lingkup Pekerjaan : .....
- d. Nilai Total HPS : Rp. ....,- (.....)
- e. Waktu Pelaksanaan : .....(.....) hari kalender
- f. Penyedia Barang : CV ..... / Toko .....
- g. Alamat : .....

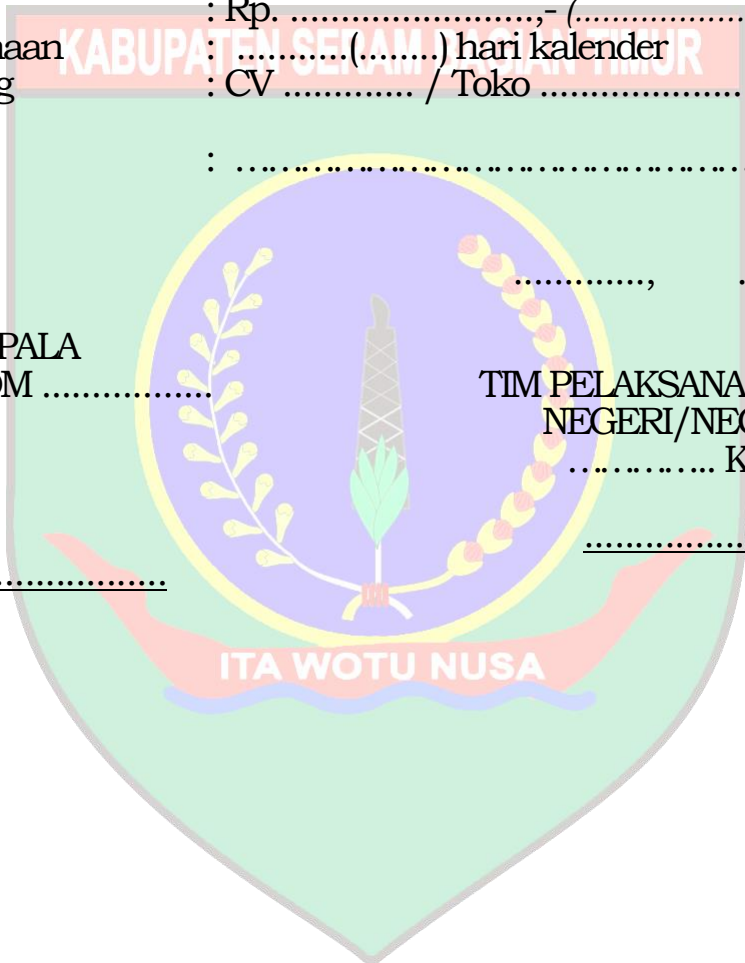
....., .....20....

MENGETAHUI KEPALA  
NEGERI/NEG. ADM .....

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEGERI/NEG. ADM  
..... KETUA

.....

.....



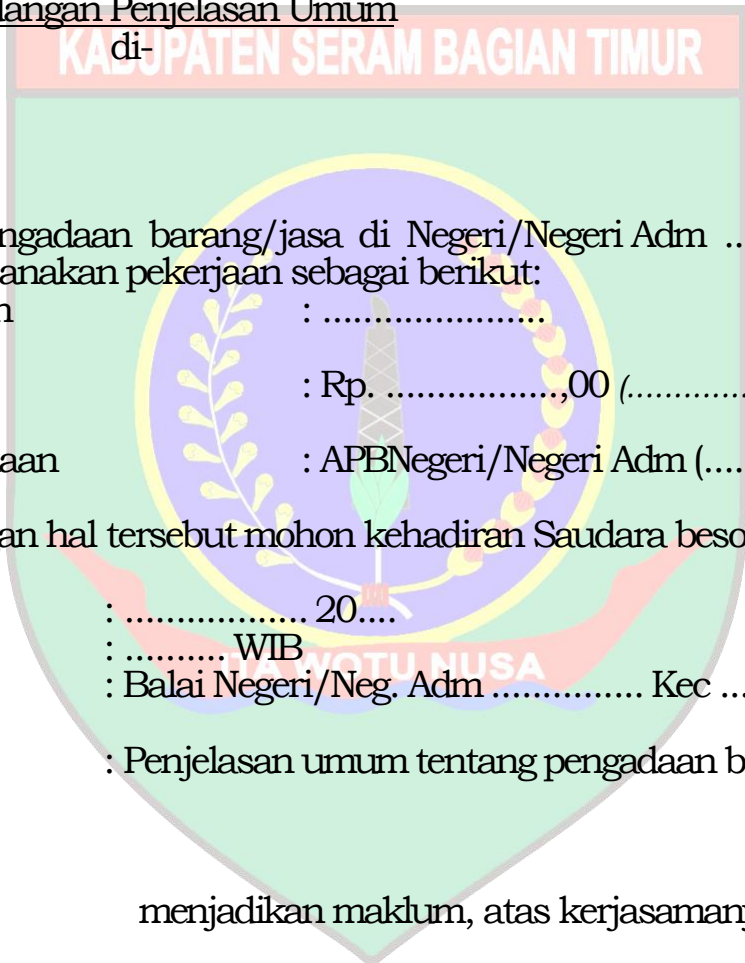
PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



13. Contoh Undangan Penjelasan Umum

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 NEGERI/NEG. ADM ..... KECAMATAN .....  
 Alamat: Negeri /Negeri Adm ..... Kecamatan ..... Kabupaten Seram  
 Bagian Timur

....., .....20.. Nomor : 005/ /20..  
 Kepada Yth:  
 Lamp : Toko/CV .....  
 Perihal : Undangan Penjelasan Umum  
 di-  
 Tempat



Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Negeri/Negeri Adm .....TA 20..., kami akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan : .....
- b. Nilai total RAB : Rp. ....,00 (.....)
- c. Sumber pendanaan : APBNegeri/Negeri Adm (.....) TA 20....

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara besok pada: Hari :

.....  
 Tanggal : ..... 20....  
 Pukul : ..... WIB  
 Tempat : Balai Negeri/Neg. Adm ..... Kec .....

Keperluan : Penjelasan umum tentang pengadaan barang/ jasa

Demikian untuk ..... menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN NEGERI/NEG. ADM.....  
 KETUA

.....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



14. Contoh Berita Acara Penjelasan Umum

TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN .....NEGERI/NEGERI ADM

Alamat : Desa ..... Kec .....

BERITA ACARA PENJELASAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Negeri/Negeri Adm ..... Kecamatan ....., telah dilaksanakan penjelasan umum kepada Calon Penyedia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pekerjaan ..... yang didanai dari ..... Tahun 20..... yang dihadiri oleh TPK, Perangkat Desa, Calon Penyedia serta unsur terkait lainnya seperti yang tercantum dalam daftar hadir. Setelah dilakukan penjelasan berkaitan pengadaan barang/jasa, selanjutnya peserta menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. TPK telah menyampaikan dan menjelaskan Instruksi kepada penyedia, jadwal pengadaan Barang dan Jasa (terlampir);
2. Calon penyedia telah memahami dan siap mematuhi aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh TPK.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON PENYEDIA  
NEG./NEG. ADM.....

TIM PELAKSANA KEGIATAN

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

KETUA

.....

MENGETAHUI, KEPALA NEGERI/NEGERI ADM

.....

.....



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

15. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Toko/Pemasok/Kontraktor : .....  
 Tahun didirikan atau Nomor Ijin Usaha (bila ada) : .....  
 Alamat Toko/Pemasok/Kontraktor : .....

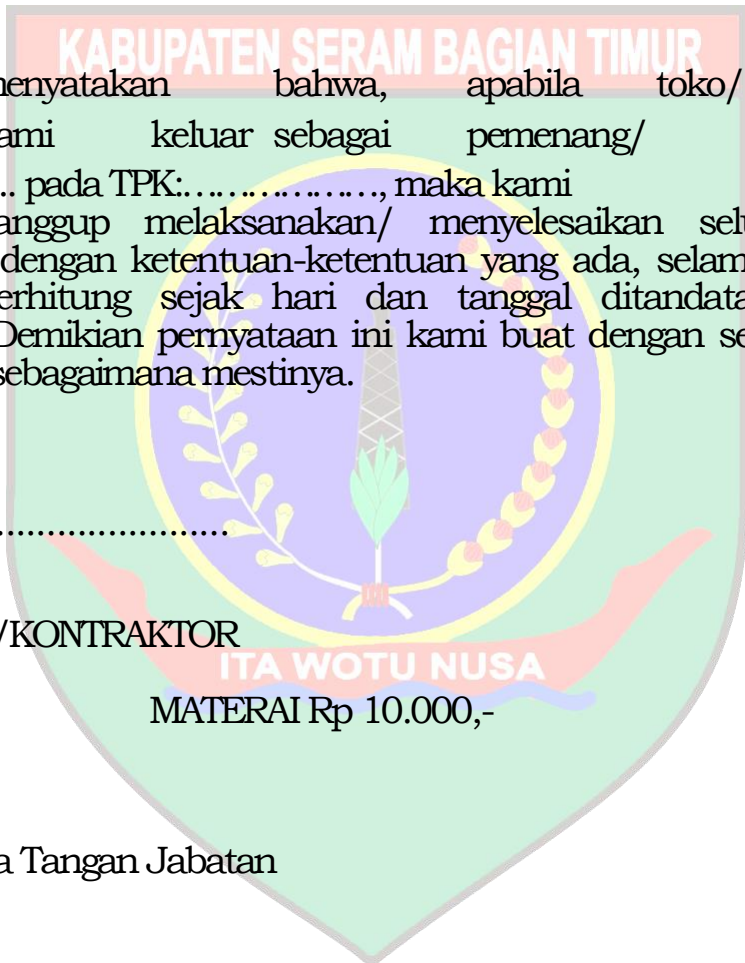
Dengan ini menyatakan bahwa, apabila toko/ pemasok/ kontraktor kami keluar sebagai pemenang/ pelaksana pekerjaan:..... pada TPK:....., maka kami bersedia dan sanggup melaksanakan/ menyelesaikan seluruh pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, selama ..... (. ....) hari kalender, terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerja. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

TOKO/PEMASOK/KONTRAKTOR

MATERAI Rp 10.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan Jabatan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

16. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Negeri Adm.  
.....Kecamatan ..... Kabupaten .....  
Alamat : Jalan ..... Nomor .....

Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik  
.....  
Alamat : .....

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .....

Pasal 2  
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp..... (.....Rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.



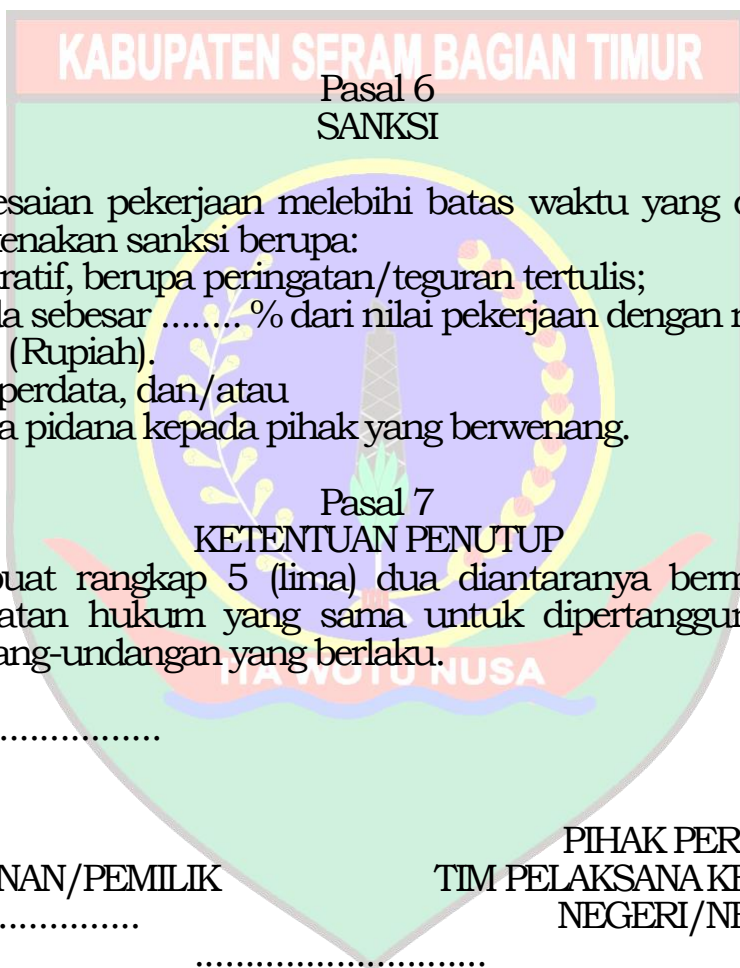
PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ..... (.....) hari kerja mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal.....

Pasal 5  
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.  
(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan



Pasal 6  
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda sebesar ..... % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. .... (Rupiah).
3. gugatan secara perdata, dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....\*), .....)

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK

.....

PIHAK PERTAMA  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEGERI/NEG.ADM

.....

KETUA

.....

.....

MENGETAHUI

KEPALA NEGERI/NEG. ADM .....

Selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm

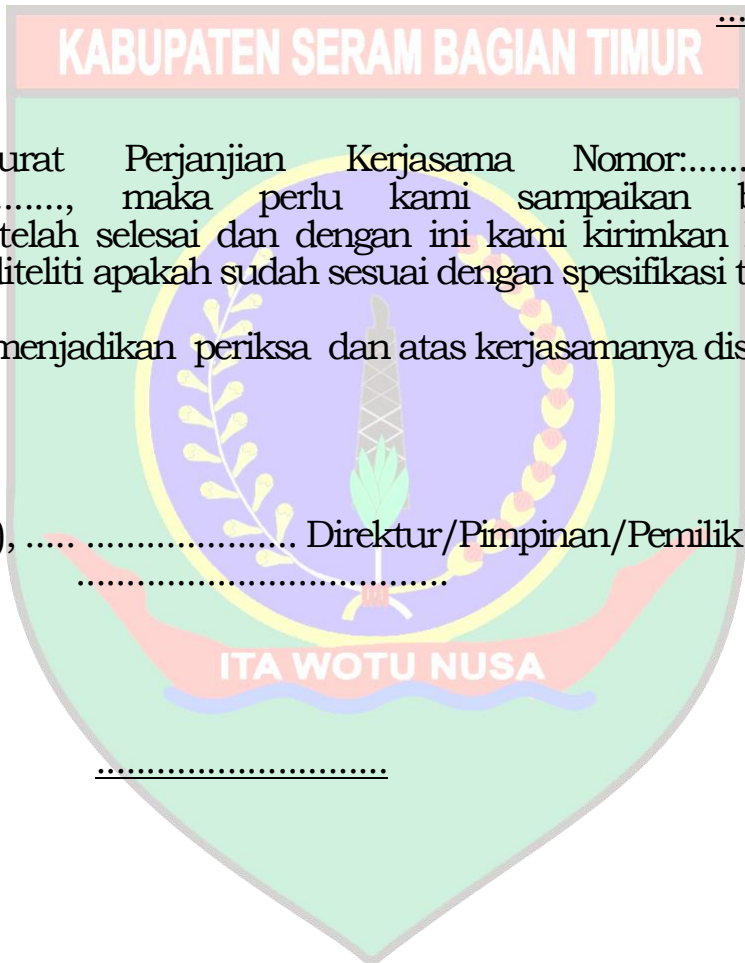


PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

17. Contoh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

.....\*), ..... Nomor :  
 Sifat : Penting : Kepada  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan  
 Adm..... Neg/Neg.  
 Perihal : Penyerahan Hasil Pekerjaan di



Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:..... tanggal  
 ....., maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan  
 ..... telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan  
 pekerjaan untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....\*), ..... Direktur/Pimpinan/Pemilik

\*) : Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

18. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : .....

Pekerjaan : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... pada Pukul ..... WIB bertempat di ..... kami yang bertandatangan di bawah ini seraca bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Barang/Jasa dari

.....  
Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Negeri Adm..... Kecamatan ..... Kabupaten..... dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari .....

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa dihadiri oleh , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Negeri Adm..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari..... dan telah sesuai dengan yang disepakati bersama.
2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima ) dua diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....\*), .....  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK      NEG/NEG.  
 ADM .....  
 .....  
 KETUA

.....

.....

MENGETAHUI KAUR/KASI.....  
SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/ Negeri Adm



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

19. Contoh Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di ....., telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan antara :

- I. Nama : .....
- Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Negeri/Negeri Adm.....  
Kecamatan ..... Kabupaten.....
- Alamat : Jalan ..... Nomor .....

Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

- II Nama : .....
- Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik .....
- Alamat : .....

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal .... atas pekerjaan, telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (.....Rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ..... tanggal ..... Atas pekerjaan ....., telah melaksanakan pekerjaan ..... sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp ..... (.....Rupiah). Pembayaran tersebut disaksikan oleh ....., Kepala Negeri/Negeri Adm ..... Kecamatan ..... Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....\*), .....

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK  
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

PIHAK PERTAMA  
KAUR/KASI.....SELAKU

.....

.....

MENGETAHUI KEPALA NEGERI/NEGERI ADM.....

Selaku  
Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Negeri/Neg. Adm

.....

\*) : Diisi Nama Negeri/Negeri Adm.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

20. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan antara :

I. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Neg. Adm. ....  
Kecamatan..... Kabupaten.....  
Alamat : Jalan ..... Nomor .....  
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik .....  
Alamat : .....  
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan ..... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal .....

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan ..... dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....\*), .....  
PIHAK KEDUA  
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK  
.....

PIHAK PERTAMA  
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEG/NEGERI .....

.....

.....

MENGETAHUI KAUR/KASI.....  
SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

.....



21. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
NEGERI/NEG. ADM ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN.....  
Jalan ..... Nomor ..... Telepon .....  
.....\*)

.....\*) , .....  
Nomor : ..... Kepada  
Sifat : Penting Yth.Kaur/Kasi.....selaku  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan di.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Negeri/ ..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota..... Nomor:..... Tahun..... tentang.....  
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Negeri/Neg. Adm. ....  
kecamatan..... Kabupaten..... Tahun Anggaran....., bersama ini kami  
laporkan dengan hormat bahwa pekerjaan..... telah selesai dilaksanakan pada  
tanggal

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan ..... sebagaimana  
terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN NEG/NEG. ADM .....  
KETUA

.....

\*) : Diisi Nama Negeri Administratif



22. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... bertempat di ..... , telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara :

I Nama : .....  
Jabatan : Kaur/Kasi.....selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Seram Bagian Timur  
Alamat : Jalan ..... Nomor .....  
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : .....  
Jabatan : Kepala Negeri/Neg. Adm..... Kecamatan  
.....Kabupaten Seram Bagian Timur  
Alamat : Jalan ..... Nomor .....  
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian hasil pekerjaan ..... dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan ..... dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ....

PIHAK KEDUA  
KEPALA NEG/NEG. ADM.....

PIHAK PERTAMA  
KAUR/KASI .....

SELAKU  
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

.....

.....

23. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Usaha

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar benar mempunyai usaha di bidang penyediaan ..... yaitu Toko/UD ..... yang masih berjalan dan beralamat di .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila di kemudian hari ternyata palsu saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl-bln-thn  
Yang menyatakan, meterai

Rp.10.000,-

ITA WOTU NUSA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MANTAN KELIOBAS